

Studi penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning* di Pemerintah Kota Jambi

Fernada Tawaffal*; Arman Delis; Junaidi

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: fernadatawaffal@gmail.com*

Abstract

This study aims to: 1) analyze the alignment of the stages of preparation of development planning documents between the menus contained in e-Planning and the contents listed in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 54 of 2010; 2) analyze the influence of human resources, the commitment of policymakers, infrastructure, and information systems on the success of the Jambi City Government in implementing e-Planning-based development planning. Data is collected through surveys. The analysis tool uses logistic regression. The results showed that the level of alignment reached more than 75%. It indicates that the process of making and implementing the e-Planning application has referred to the regulation. Based on the results of logistic regression analysis, it shows that partially, the commitment of policymakers, infrastructure, and information systems significantly influences the success of e-Planning implementation.

Keywords: *E-planning, development planning, information systems*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keselarasan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara menu yang termuat dalam e-Planning dengan muatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; 2) menganalisis pengaruh sumberdaya manusia, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi terhadap kesuksesan Pemerintah Kota Jambi dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-Planning. Data dikumpulkan melalui survai. Alat analisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keselarasan mencapai lebih dari 75%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan dan penerapan aplikasi e-Planning telah mengacu pada peraturan tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa secara parsial, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan e-Planning..

Kata kunci: *E-planning, Perencanaan pembangunan, Sistem informasi*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dinilai sangat penting dan bersifat strategis semenjak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana undang-undang tersebut mengatur Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding Pemerintah Pusat

yang hanya bertugas sebatas menjamin konsistensi kebijakan nasional. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi untuk membangun daerahnya sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ini dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah tersebut mempunyai kewenangan melakukan perencanaan pembangunan didaerahnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah merinci masing-masing kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi 31 bidang urusan, diantaranya adalah urusan perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah instansi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pembangunan antar OPD (Pratolo, 2008).

Pemerintah perlu menyiapkan strategi pembangunan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dalam menghadapi kemajuan teknologi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan kurang maksimal adalah faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memahami kemajuan dari teknologi dengan lemahnya kemampuan sumber daya manusia secara tidak langsung menghambat proses bisnis dari pengelolaan perencanaan pembangunan melalui sistem informasi (Drina et al, 2014). Posisi komitmen pemangku kebijakan yang sangat penting dalam proses bisnis dari pengelolaan perencanaan pembangunan melalui sistem informasi membawa sebuah pembelajaran bahwa upaya mewujudkan inovasi sebenarnya sangat membutuhkan komitmen penuh dari para pemangku kebijakan yang berkepentingan. Keterlibatan, tantangan dan dukungan pemangku kebijakan terhadap proses tersebut menjelaskan sebuah pemikiran bahwa upaya mewujudkannya sangat bergantung pada komitmen pemangku kebijakan. Secara spesifik, komitmen pemangku kebijakan dalam proses pengelolaan perencanaan pembangunan melalui sistem informasi sangat dibutuhkan karena di pemerintahan memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani berbagai permasalahan publik. Untuk dapat meningkatkan berbagai kualitas pelayanan publik dengan aplikasi inovasi, diperlukan langkah kolaboratif dan kerjasama yang baik antara organisasi publik dengan seluruh pemangku kebijakan yang berkepentingan (Lukman, 2012).

Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sudah banyak memanfaatkan perpaduan antara sistem informasi manajemen dengan perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan memiliki tujuan memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan, selain itu juga akan membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat

kabupaten/kota bagi pemerintah daerah dan sampai dengan tingkat nasional bagi pemerintah pusat. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang efektif dapat mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang ada. Agar pembangunan daerah berjalan efektif, maka pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah (Alfian, 2014).

Sistem Informasi *e-Planning* yang dikembangkan dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi telah dirintis sejak Tahun 2002 memiliki banyak kekurangan dan permasalahan terutama dari kurang siapnya Pemerintah Kota Jambi dalam menerapkan sistem tersebut. Adapun permasalahan yang ditemukan diantaranya belum maksimalnya sosialisasi bagi masyarakat dan pelatihan bagi admin sistem yang akan berperan aktif menerima semua usulan dari masyarakat dan belum maksimalnya dukungan infrastruktur sarana prasarana teknologi seperti belum tersambungny jaringan internet ke seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning* di Pemerintah Kota Jambi.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bermaksud mengetahui strategi Pemerintah Kota Jambi khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengukur kesuksesan pembangunan berbasis *e-Planning*, dimana secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan tersebut meliputi 4 (empat) variabel yakni sumber daya manusia, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yang bersumber dari suvai. Responden adalah tim e-planning Pemerintah Kota Jambi termasuk operator e-planning. Jumlah sampel/responden sebanyak 112 orang.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner dan wawancara kepada responden terpilih.

Alat analisis

Variabel-variabel penelitian dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan Pemerintah Kota Jambi dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning* menggunakan model regresi binary logit, dengan persamaan sebagai berikut:

$$EP = \beta_0 + \beta_1SDM + \beta_2KPK + \beta_3SP + \beta_4SI + e_i$$

dimana:

EP = kesuksesan penerapan e-planning (1= sukses, 0=tidak sukses)

SDM = sumberdaya manusia

KPK = komitmen pemangku kebijakan

SP = sarana prasarana

SI = sistem informasi

Pengukuran variabel

Data dari variabel dalam model diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan jawaban/respons skala Likert. Sumberdaya manusia diukur dari 11 pertanyaan. Komitmen pemangku kepentingan diukur dari 8 pertanyaan. Sarana prasarana diukur dari 6 pertanyaan. Sistem informasi diukur dengan 6 pertanyaan. Selanjutnya, kesuksesan diukur dari pandangan responden terkait dengan kesuksesan penerapan e-planning (sukses atau tidak sukses)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan reliabilitas

Sumber daya manusia

Hasil uji validitas kuesioner menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing pernyataan $>$ nilai r table $=0,361$ dan nilai R yang didapatkan adalah $0,348$. Nilai signifikansi yang didapat adalah diatas $0,05$ ($P>0,05$). Ini menunjukkan bahwa kuesioner variabel sumberdaya manusia tersebut adalah valid.

Nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh sebesar $0,719$. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (reliabel) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $>0,60$. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengukuran variabel sumber daya manusia sudah reliabel.

Komitmen pemangku kebijakan

Nilai data validasi komitmen pemangku kebijakan, pada pertanyaan 8 didapat pertanyaan yang tidak valid karena nilai R kecil dari pada nilai R -tabel, dimana nilai R tabel adah $0,361$ dan nilai R yang didapatkan adalah $0,167$. Nilai signifikansi yang didapatkan adalah diatas $0,05$ ($P > 0,05$) yaitu sebesar $0,377$ sehingga pertanyaan pada point 8 pada variabel komitmen pemangku kebijakan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada poin kuisoner.

Nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, sehingga variabel komitmen pemangku kebijakan ini dapat dikatakan realibel.

Sarana prasarana

Hasil uji validitas kuesioner menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing pernyataan, dimana semua masing-masing nilai korelasi r hitung $>$ nilai r table $=0,361$ dan nilai R yang didapatkan adalah $0,348$. Nilai signifikansi yang didapat adalah diatas $0,05$ ($P>0,05$). Ini menunjukkan bahwa kuesioner variabel sumberdaya manusia tersebut adalah Valid, yaitu variabel sumberdaya manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut tepat sebagai alat ukur variabel sumberdaya manusia.

Nilai *Cronbach's Alpha* $0,839 > 0,60$, sehingga variabel sarana prasana dapat dikatakan realibel.

Sistem informasi

Didapatkan nilai R yang lebih besar dari nilai R -tabel pada setiap butir pertanyaan yang diajukan kepada tiap responden, serta juga didapatkan nilai signifikansi kecil dari $0,05$ ($P < 0,05$). Sehingga, seluruh pertanyaan yang akan divalidasi pada variabel independen sarana dan prasarana dinyatakan valid dan untuk selanjutnya siap untuk diolah dan siap untuk dilakukan uji realibilitas terhadap setiap pertanyaan yang telah dinyatakan valid pada variabel ini

Nilai *Cronbach's Alpha* $0,734 > 0,60$, sehingga variabel sistem informasi dapat dikatakan realibel.

Analisis keselarasan

Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini ialah dengan menggunakan matrik keselarasan yaitu berupa materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010), menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator dan menu input *e-Planning* sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembangunan seperti dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis keselarasan

No	Pernyataan
1.	Materi atau muatan dalam <i>e-Planning</i> sesuai dengansiklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010)
2.	Materi atau muatan dalam <i>e-Planning</i> sesuai dengan tata laksana perencanaan Pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010)
3.	Menu input <i>e-Planning</i> mudah dipahami oleh operator
4.	Menu input <i>e-Planning</i> sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembangunan

Materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010). Analisis terkait keselarasan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan matrik, tetapi juga dianalisis dengan menggunakan kuesioner dari responden. Hasil analisis data responden terkait keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) menunjukkan sebagian besar sesuai (83%), selebihnya menunjukkan tidak sesuai (17%). Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) adalah sudah sesuai. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi atau muatan dalam *e-Planning*(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

		Frekuensi	Persentase	Persentase Valid
Valid	Sesuai	73	83,00	83,00
	Tidak Sesuai	15	17,00	17,00
	Total	88	100,00	100,00

Materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan tata laksana perencanaan Pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010). Hasil analisis data keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan tata laksana perencanaan pembangunan daerah (mengacupada Permendagri No. 54 Tahun 2010) menunjukkan sebagian besar sesuai (79,5), selebihnya menunjukkan tidak sesuai (20,5%). Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan tata laksana perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) adalah sudah sesuai. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Materi atau muatan dalam *e-Planning*(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid
Valid Sesuai	70	79,50	79,50
Tidak Sesuai	18	20,50	20,50
Total	88	100,00	100,00

Menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator Hasil analisis data keselarasan tentang menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator menunjukkan sebagian besar sesuai (79,5%), selebihnya menunjukkan tidak sesuai (20,5%). Hal ini menunjukkan bahwa menu input *e-Planning* adalah sudah sesuai. Data selengkapny dapat dilihat pada Tabel 8.

Menu input *e-Planning* sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembangunan. Hasil analisis data keselarasan tentang menu input *e-Planning* sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembangunan menunjukkan sebagian besar sesuai (79,5%), selebihnya menunjukkan tidak sesuai (20,5%). Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan menu input *e-Planning* adalah sudah sesuai.

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil analisis keselarasan diatas menunjukkan bahwa secara umum sesuai tentang :Materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) dengan jumlah responden yang menyatakan sesuai sebesar 83%.Materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan tata laksana perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) dengan jumlah responden yang menyatakan sesuai sebesar 79,5%. Menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator dengan jumlah responden yang menyatakan sesuai sebesar 79,5%.Menu input *e-Planning* belum cukup sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan penamaan atau nomenklatur pada format manual dokumen dengan *e-Planning* menyatakan sesuai 79,5%.

Tabel 4. Menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator

	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid
Valid Sesuai	70	79,50	79,50
Tidak Sesuai	18	20,50	20,50
Total	88	100,00	100,00

Kesuksesan pelaksanaan e-planning

Kesuksesan *e-Planning* oleh Pemerintah Kota Jambi yang meliputi: sumberdaya manusia, pemangku kebijakan, sarana prasarana, dan sistem informasi. Berdasarkan kesiapan dari 4 (empat) variabel tersebut merupakan pendukung terhadap kesiapan pelaksanaan *e-Planning*. Hasil analisis deskriptif tentang kesiapan sumberdaya manusia menunjukkan sebagian besar belum sukses (4,5%) dan selebihnya sukses (95.5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sumberdaya manusia adalah sukses.

Berdasarkan hasil analisis kesiapan pelaksanaan *e-Planning* diatas menunjukkan bahwa secara umum yang belum siap, yaitu kesuksesan sumber daya manusiayang dalam hal ini adalah para operator *e-Planning* sudah menunjukan kesuksesan dalam pengimplementasian *e-Planning*, namun ada baiknya dilaksanakan

pelatihan berkala kepada para operator. Pelatihan akan membuat para operator semakin mantap dalam kesuksesan *e-Planning*. Komitmen pemangku kebijakan dinyatakan sudah sukses dikarenakan sudah terinformasinya secara menyeluruh terkait penerapan *e-Planning* tersebut.

Sarana prasarana merupakan faktor penting dalam penerapan *e-Planning*, dinyatakan sudah sukses karena sarana prasarana untuk pelaksanaan *e-Planning* masih tergabung dengan sarana prasarana pekerjaan tugas lainnya. Sistem informasi yang dalam hal ini adalah *e-Planning* itu sendiri dinyatakan sudah sukses karena sebagaimana diketahui *e-Planning* tersebut sudah banyak diterapkan di berbagai pemerintah daerah. Penyesuaian *e-Planning* dengan kondisi perencanaan pembangunan di Kota Jambi juga sudah dilaksanakan dengan intensifnya koordinasi antara BPPT dengan Bappeda Kota Jambi. Pelaksanaan *e-Planning* berdasarkan penilaian responden sudah menunjukkan angka 79,5%, hal ini menyatakan bahwa lebih dari setengah jumlah responden menyatakan sudah sukses. Kesuksesan pelaksanaan *e-Planning* ditujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Kesuksesan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya merupakan perencanaan pembangunan yang ideal atau yang lebih kita kenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Sistem perencanaan partisipatif telah digunakan dan dilegalkan di negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa “setiap proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional harus melibatkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam sebuah forum pertemuan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan hal ini maka kepada setiap pemerintah daerah diberikan hak otonomi yang luas untuk mengelola dan mengurus segala hal yang terkait dengan kesejahteraan daerah dan kepentingan daerah. Optimalisasi pembangunan pada setiap daerah harus dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang memiliki orientasi kepada segala hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab yang besar justru didapatkan oleh pemerintah daerah karena diharuskan untuk membuat percepatan laju pembangunan daerah, yang hal ini telah dikuatkan melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah akan memicu terjadinya perkembangan pada setiap daerah, baik secara fungsional, kultural maupun struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Seymour & Turner, 2002).

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang 29 Tahun 1999 merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kecamatan mengalami perubahan perubahan oleh hal tersebut, dimana diberlakukannya Undang-Undang 29 Tahun 1999 yang merupakan perangkat wilayah dengan kerangka asas dekonsentrasi yang mengalami pergeseran statusnya menjadi perangkat daerah dengan kerangka asas desentralisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan wewenang dari dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pemanfaatan sistem informasi memiliki peran penting dalam kesuksesan pembagunan, dalam hal ini adalah pada pemerintahan kota jambi. Pemanfaatan sistem informasi mampu memfasilitasi proses pembagunan daerah mulai dari awal hingga pengkajian kesuksesan pembagunan tersebut untuk tercapainya tujuan utama dari pembagunan tersebut ialah untuk mensejahterakan masyarakat (Wang, Song, Hamilton, & Curwell, 2007).Pembagunan daerah berbasis sistem informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Planning* yang dimulai dengan membangun kerjasama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pemerintah Kota Jambi dalam rangka perumusan sistem aplikasi tersebut. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi rekomendasi utama, karena memang telah terbukti sukses dalam membuat aplikasi serupa pada beberapa wilayah di Indonesia, contohnya seperti Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kutai dan Kota Tangerang Selatan (Habibi, 2018).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi merupakan pelaksana dan pemangku tanggung jawab terhadap kesuksesan *e-Planning* ini. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhubungan dengan sistem informasi, tetapi program ini merupakan bagian dari program pembagunan daerah, hal ini disebabkan karena sangat berpotensi dalam mendukung terciptanya kesuksesan pembagunan yang optimal (Silva & Planning, 2010). Dalam optimalisasi pembagunan, usulan program kegiatan telah dilakukan pengembangan oleh pemerintahan kota Jambi, baik usulan kegiatan standar hingga nanti siap dikembangkan dan dilaksanakan melalui *e-Planning* (Habibi, 2018; Scott, 2002).Program dan kegiatan yang dilakukan selama ini masih bersifat manual yaitu dengan cara setiap Kelurahan, Kecamatan, maupun OPD menyampaikan usulan perencanaannya dengan menyampaikan surat yang ditujukan kepada Bappeda untuk selanjutnya diolah menjadi dokumen perencanaan pembagunan tingkat Kota Jambi. Terkait evaluasi kesuksesan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan sistem ini mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kota Jambi. Sistem informasi pembagunan berbasis *e-Planning* ini mengupayakan terciptanya optimalisasi pembagunan di Kota Jambi, untuk kemudian dikaji kelayakan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini secara baik untuk kedepannya (Antunes, dkk., n.d.; Wallin, dkk., (2012).

Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini ialah dengan menggunakan matrik keselarasan yaitu berupa materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembagunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010), menu input *e-Planning* mudah dipahami oleh operator dan menu input *e-Planning* sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembagunan.

Tabel 5. Analisis keselarasan

Pernyataan
Materi atau muatan dalam <i>e-Planning</i> sesuai dengansiklus pelaksanaan perencanaan pembagunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010)
Materi atau muatan dalam <i>e-Planning</i> sesuai dengan tata laksana perencanaan Pembagunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010)
Menu input <i>e-Planning</i> mudah dipahami oleh operator
Menu input <i>e-Planning</i> sesuai dengan format manual dokumen perencanaan pembagunan

Analisis terkait keselarasan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan matrik, tetapi juga dianalisis dengan menggunakan kuesioner dari responden. Hasil analisis data responden terkait keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) menunjukkan sebagian besar sesuai (83%), selebihnya menunjukkan tidak sesuai (17%). Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan tentang materi atau muatan dalam *e-Planning* sesuai dengan siklus pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010) adalah sudah sesuai. Kesuksesan *e-Planning* oleh Pemerintah Kota Jambi yang meliputi: sumberdaya manusia, pemangku kebijakan, sarana prasarana, dan sistem informasi. Berdasarkan kesiapan dari 4 (empat) variabel tersebut merupakan pendukung terhadap kesiapan pelaksanaan *e-Planning*. Hasil analisis deskriptif tentang kesiapan sumberdaya manusia menunjukkan sebagian besar belum sukses (4,5%) dan selebihnya sukses (95.5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sumberdaya manusia adalah sukses.

Kesuksesan sumber daya manusiayang dalam hal ini adalah para operator *e-Planning* sudah menunjukan kesuksesan dalam pengimplementasian *e-Planning*, namun ada baiknya dilaksanakan pelatihan berkala kepada para operator. Pelatihan akan membuat para operator semakin mantap dalam kesuksesan *e-Planning*. Komitmen pemangku kebijakan dinyatakan sudah sukses dikarenakan sudah terinformasinya secara menyeluruh terkait penerapan *e-Planning* tersebut. Sarana prasarana merupakan faktor penting dalam penerapan *e-Planning*, dinyatakan sudah sukses karena sarana prasarana untuk pelaksanaan *e-Planning* masih tergabung dengan sarana prasarana pekerjaan tugas lainnya. Sistem informasi yang dalam hal ini adalah *e-Planning* itu sendiri dinyatakan sudah sukses karena sebagaimana diketahui *e-Planning* tersebut sudah banyak diterapkan di berbagai pemerintah daerah.

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa penyesuaian *e-Planning* dengan kondisi perencanaan pembangunan di Kota Jambi juga sudah dilaksanakan dengan intensifnya koordinasi antara BPPT dengan Bappeda Kota Jambi. Pelaksanaan *e-Planning* berdasarkan penilaian responden sudah menunjukkan angka 79,5%, hal ini menyatakan bahwa lebih dari setengah jumlah responden menyatakan sudah sukses. Kesuksesan pelaksanaan *e-Planning* ditujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Hasil analisis deskriptif mengenai Bagian Perencanaan Pelaporan (operator *e-Planning*) memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup menunjukkan sebagian besar sangat setuju (31.8%) dan sangat setuju (30.7%). Keadaan ini menunjukkan bahwa secara umum memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup. Dengan demikian kurang perlu adanya penambahan jumlah staf yang berkualifikasi.

Tabel 6. Hasil regresi binary logistik pengaruh terhadap kesuksesan Pemerintah Kota Jambi dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning*

Variabel	B	S.E	Wald	df	Sig	Exp (B)	95.0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
SDM	.030	.063	.220	1	.639	1.030	.910	1.166
KPK	-.285	.101	7.958	1	.005	.752	.617	.917
SP	.819	.194	17.770	1	.000	2.268	1.550	3.319
SI	.370	.117	9.936	1	.002	1.447	1.150	1.821
Constant	-12.235	3.818	10.268	1	.001	.000		

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan pelaksanaan e-planning. Signifikannya pengaruh komitmen pemangku kebijakan ini sejalan dengan temuan penelitian Dewi dan Dwirandra (2013), Fitri (2012). Signifikannya pengaruh sistem informasi ini sejalan dengan temuan Indriasari (2008).

Sebaliknya, sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan e-planning. Tidak signifikannya sumberdaya manusia ini tidak sejalan dengan temuan Suhendri (2019) dan Sudiarianti (2015)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (*e-Planning*) dibangun dengan tujuan sebagai sarana pengolahan data elektronik khususnya dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Kesuksesane-*Planning* bagi Pemerintah Kota Jambi menjadi suatu hal penting dalam penerapan *e-Planning* yang ditinjau dari variabel sumberdaya manusia, sarana prasarana, komitmen pemangku kebijakan, dan sistem informasi dari *e-Planning* itu sendiri. Keselarasan antara menu input *e-Planning* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan yang secara umum mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menunjukkan tingkat keselarasan mencapai lebih dari 75%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan dan penerapan aplikasi *e-Planning* telah mengacu pada peraturan tersebut. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa nilai koefisien determinansi sebesar 0.135, artinya pengaruh variabel sumberdaya manusia, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi secara bersama-sama terhadap kesiapan *e-Planning* sebesar 78,4%. Sedangkan apabila secara parsial, variabel sumberdaya manusia komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana berpengaruh secara signifikan mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-Planning*.

Saran

Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pengkajian kesuksesan aplikasi *e-Planning* perlu meningkatkan beberapa hal yakni variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti sumberdaya manusia, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana dan sistem informasi. Peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang dalam hal ini adalah PNS Pemerintah Kota Jambi khususnya para operator *e-Planning* merupakan hal yang harus diprioritaskan, sedangkan variabel lain dapat menyesuaikan dengan memperhatikan urutan prioritas dan pengaturan waktu serta kemampuan anggaran. Kapabilitas para operator *e-Planning* dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara intensif. Level operasional harus mampu mengaplikasikan *e-Planning* Pemerintah Kota Jambi ini secara berkelanjutan. Konteks keberlanjutan mengandung arti bahwa *e-Planning* Pemerintah Kota Jambi ini harus terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya termasuk integrasi dengan sistem penganggaran seperti contoh pemerintah daerah lain yang telah menerapkan *e-Planning* secara *full modul*. Penelitian lebih lanjut agar penelitian dilakukan lebih mendalam dan menggunakan variabel-variabel lain selain sumberdaya manusia, komitmen pemangku kebijakan,

sarana prasarana dan sistem informasi yang diduga berpengaruh dalam kesuksesan aplikasi *e-Planning*. Adapun variabel lain tersebut diantaranya karakteristik darimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), analisis beban kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan karakter masing-masing individu sebagai operator *e-Planning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal 3rd Economics & Business Research Festival 2014*.
- Antunes, P., Sapateiro, C., Zurita, G., & Baloian, N. (n.d.). (2010). Integrating Spatial Data and Decision Models in an E-Planning Tool. CRIWG 2010, LNCS 6257 *International Conference on Collaboration and Technology*, 97-112
- Dewi, S.A.N.T & Dwirandra, AANB. (2013). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 196-214
- Drina S. R..M., Sulandari, S., & Rihandoyo, R. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy and Management Review*,3(3), 201-211, doi:<http://dx.doi.org/10.14710/jppmr.v3i3.5746>.
- Fitri, N. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Farmasi di Medan. Tesis. Universitas Sumatera Utara
- Habibi, M. (2018). *Evaluasi Implementasi Sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Pendekatan Metode PEGI*.
- Habibi, M. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Pendekatan Metode PEGI. *INA Rxiv Papers*, 1-22, <https://doi.org/10.31227/osf.io/t3cfe>
- Indriasari, D. & Nahartyo, E. (2008). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Lukman. (2012). Analisis Komitmen Stakeholders dan Shareholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, XVI(1), 112-126
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah : Indonesia.S Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 2(4), 33–51.
- Horelli, L., & Wallin, S. (2010). Future-making assessment approach as a tool for e-planning and community development. In C. N. Silva (Ed.), *Handbook of research on e-planning : ICTs for urban development and monitoring*, 58-79
- Pratolo, S. (2008). Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada Organisasional, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip good

Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* IX (1), Januari 2008:15-32.

Wang, H., Song, Y., Hamilton, A., & Curwell, S. (2007). Urban information integration for advanced e-Planning in Europe. *Government Information Quarterly*, 24, 736–754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.002>.